



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
KOMISI VI DPR RI  
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN), KOMISI PENGAWAS  
PERSAINGAN USAHA (KPPU), BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP  
BATAM), DAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN  
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS SABANG)**

- Tahun Sidang : 2024 – 2025  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke- : 12 (Dua belas)  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Rabu, 11 September 2024  
Waktu : Pukul 14.33 s.d. 15.31 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI,  
Gedung Nusantara I DPR RI,  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
- Ketua Rapat : M. Sarmuji, S.E., M.Si.  
(Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-P.Golkar )
- Acara : Pembahasan mengenai :  
1. Penyesuaian RKA KL Tahun Anggaran 2025  
(Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran);  
dan  
2. Lain-lain.
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si  
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi VI DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**  
21 dari 53 orang Anggota dengan rincian:
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI  
INDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)**  
4 dari 12 orang Anggota
    1. Aria Bima
    2. Rieke Diah Pitaloka
    3. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
    4. Sondang Tiar Debora Tampubolon
    5. Dr. Ir. Harris Turino, M.Si., M.M.

**2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG)**

4 dari 8 orang Anggota

6. M. Sarmuji, S.E., M.Si.
7. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
8. Doni Akbar, S.E., M.M.
9. Drs. H. Dadang S. Muchtar

**3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P.GERINDRA)**

3 dari 7 orang Anggota

10. Andre Rosiade
11. Khilmi
12. Ir. H. La Tinro La Tunrung

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P.NASDEM)**

2 dari 6 orang Anggota

13. Martin Manurung, S.E., M.A.
14. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)**

1 dari 5 orang Anggota

15. Tommy Kurniawan

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)**

0 dari 5 orang Anggota

-

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)**

3 dari 4 orang Anggota

16. Amin Ak, M.M.
17. Hj. Nevi Zuairina
18. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)**

3 dari 4 orang Anggota

19. Dr. H. Jon Erizal, S.E., M.B.A.
20. Abdul Hakim Bafagih
21. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)**

0 dari 2 orang Anggota

-

**B. PEMERINTAH/UNDANGAN:**

1. Kepala Badan Standardisasi Nasional (Kukuh S. Achmad) beserta jajaran;
2. Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, S.T., M.T., IPU.Asean Eng.) beserta jajaran;
3. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Muhammad Rudi) beserta jajaran;
4. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Iskandar Zulkarnaen) beserta jajaran.

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (M.SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Baik, kita mulai saja ya.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
Om swastiastu,*

**Yang terhormat Pimpinan, dan  
Anggota Komisi VI DPR RI,  
Yang terhormat dan kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional, Pak Kukuh,  
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pak Ifan,  
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Pak Rudi,  
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Pak Iskandar Zulkarnain, beserta seluruh jajaran,**

Puji syukur marilah kita *haturkan* ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Taala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkenan-Nya pada hari ini kita bisa hadir dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BSN, Ketua KPPU, Kepala BP Batam dan Kepala BPKS Sabang dalam keadaan sehat walafiat.

Menurut laporan sekretariat, absen yang sudah menandatangani 20 orang, izin 13 orang, jumlah fraksi 7 fraksi. Dengan demikian, rapat ini sudah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Pasal 276 ayat (1), maka perkenankan kami membuka rapat dengar pendapat pada hari ini dan rapat ini saya nyatakan terbuka untuk umum.



Setuju ya?

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.33 WIB)  
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala BSN, Ketua KPPU, Kepala BP Batam, dan Kepala BPKS Sabang atas kesediaan hadir pada rapat kali ini. Dan sesuai dengan undangan yang kami sampaikan, rapat hari ini membahas mengenai penyesuaian RKA KL Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.

Untuk itu saya minta persetujuan juga rapat bisa kita akhiri jam. Berapa, Pak Harris? Setengah 4? Maksimal setengah 4 *lah*, setengah 4 *lah*. Itu ada, ada. Tenang *aja*.

Dan ini *kayaknya* juga tidak membutuhkan waktu yang panjang, karena fokus kita hanya penyesuaian RKA KL saja, kita akan akhiri pukul 15.30.

**(RAPAT: SETUJU)**

**Bapak-Bapak/Ibu-ibu hadirin yang kami muliakan,**

Dapat kami sampaikan, bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Badan Anggaran Nomor B garis miring sekian-sekian, tanggal 10 September 2024 perihal Penyampaian Hasil Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2025, maka dapat kami sampaikan hasil pembahasan belanja Kementerian Lembaga dari Badan Anggaran sebagai bahan penyempurnaan RKA KL mitra kerja Komisi VI Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 Badan Standardisasi Nasional (BSN) ditetapkan sebesar Rp223.870.000.000,00.

*Enggak* berubah, Pak Kepala, ya?

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL (KUKUH S. ACHMAD):**

Angkanya sedikit berubah, Pak Pimpinan.  
Tadinya Rp223.867.000.000,00, berselisih sekitar 3 juta rupiah, Pak Pimpinan.

**KETUA RAPAT (M.SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Oke*. 223.67 atau 87?

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL (KUKUH S. ACHMAD):**

867.

**KETUA RAPAT (M.SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

867, bukan 87. 867 ya?

Oh, pembulatan dari Banggar 87, oke, tapi resminya 867.

Iya, komanya, komanya.

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL (KUKUH S. ACHMAD):**

867 juta 121 ribu rupiah.

**KETUA RAPAT (M.SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Oke.Baik, nanti kita itu sama-sama. Ini pembulatan dari Banggar saja.

2. Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), ditetapkan sebesar Rp105,37 miliar.

Sebaiknya nanti dipersetujuannya bukan pembulatan ya, karena persisi angkanya.

3. Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ditetapkan sebesar Rp1.992.730.000.000,00.

4. Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ditetapkan sebesar Rp53,49 miliar.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengharapkan kepada masing-masing lembaga untuk dapat segera menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Badan dengan rincian per program untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan selambat-lambatnya tanggal 12 September 2024.

Terkait dengan hal tersebut, kami persilakan kepada Kepala BSN, Ketua KPPU, Kepala BP Batam dan Kepala BPKS Sabang untuk menyampaikan tanggapannya atau paparannya singkatnya. Ini saja, sedikit saja, karena *enggak* banyak berubah jadi tidak perlu panjang-panjang.

Kami persilakan.

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL (KUKUH S. ACHMAD):**

Baik.

*Bismillahirrahmanirrahim,*



*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
*Shalom,*  
*Om Swastiastu*  
*Namo Buddhaya,*  
Salam Kebajikan,

**Yang saya hormati, yang kami hormati Bapak/Ibu Pimpinan,  
Anggota Komisi VI DPR RI,  
Yang saya hormati, Ketua KPPU,  
Kepala BP Batam, dan  
Kepala BPKS Sabang, serta  
Bapak/Ibu hadirin sekalian yang hadir pada Rapat RDP siang hari ini,**

*Alhamdulillah rabbil alamin,*

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Taala*, pada hari ini kita bisa berkumpul pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI untuk melakukan pembahasan Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.

**Bapak/Ibu Pimpinan, dan  
Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati,**

Jadi, sebagaimana yang telah kita bahas pada Rapat Dengar Pendapat sebelumnya pada tanggal 2 September 2024, BSN memperoleh Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp223.867.121.000,00. Tadi berdasarkan informasi dari Bapak Pimpinan Komisi, disampaikan ada pembulatan dari Banggar. Mungkin nanti kita akan sesuaikan kesimpulannya, Bapak Pimpinan. Pada dasarnya anggaran tersebut sama dengan Pagu Indikatif BSN dan tidak ada perubahan.

Hal-hal yang berkaitan dengan alokasi anggaran untuk masing-masing unit Eselon 1 sudah kami sampaikan pada saat Rapat Dengar Pendapat 2 September yang lalu.

Tetapi, Bapak Pimpinan, izinkan kami tetap menyampaikan bahwa sebetulnya BSN inginnya tetap mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp65 miliar. Ada satu hal yang mungkin sangat *urgent*, yaitu untuk pengadaan peralatan laboratorium bidang radiasi dan medik. Karena BSN, ketika Badan Tenaga Nuklir Nasional diakuisisi menjadi BRIN, laboratorium yang berkaitan dengan radiasi itu diserahkan kepada BSN dan kita memerlukan revitalisasi untuk itu. Tetapi, nantinya kita akan mengikuti apa yang menjadi keputusan Banggar untuk dilaksanakan oleh Badan Standardisasi Nasional.

Kami rasa demikian.



**Bapak/Ibu Pimpinan, dan  
Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati,**

Jadi, tentu BSN tetap mengharap dukungan dari Bapak/Ibu Pimpinan, Anggota Komisi VI untuk kelancaran kesuksesan program dan kegiatan Badan Standardisasi Nasional Tahun 2025, terutama dalam konteks memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing nasional kita.

**Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,**

Kami dari BSN juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang telah membimbing BSN selama hampir 5 tahun untuk kegiatan periode 2019 – 2024. Untuk itu kami sekali lagi, mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas kerja samanya, atas dukungannya dan tentu permohonan maaf apabila selama hampir 5 tahun terakhir ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama dalam BSN melakukan kolaborasi dengan Bapak/Ibu Pimpinan, Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati.

Demikian, terima kasih.

Saya akhiri.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (M.SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Terima kasih, Pak Kepala BSN.

Selanjutnya Ketua KPPU

**KETUA KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA (Dr. Ir. M. FANSHURULLAH ASA, S.T., M.T., IPU.):**

Terima kasih.

**Bapak Pimpinan, dan  
Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati,  
Bapak Kepala BSN,  
Kepala BP Batam,  
Kepala BPKS Sabang, dan  
Teman-teman Komisioner KPPU yang saya hormati,**

Saya singkat saja *nih*, Pak. Saya izin, Pak Ketua, dan Anggota, ada pantun sedikit saya sampaikan,

*Palinglah enak si Ikan Kerapu  
Dimasak santan tambatkan selera,*



*Izinkan penyampaian kami dari KPPU  
Yang selalu baik dan kerja sama dengan Komisi VI*

Cukup, cukup, satu aja, Pak. Baik, cakepnya *gak* ada tadi, Pak. Baik.

**Pimpinan, dan  
Anggota dari Komisi VI DPR RI yang kami hormati,**

Izinkan kami menyampaikan, bahwa *Alhamdulillah* tanggal 10 September kemarin, kami sudah mendapat Perpres yang ditandatangani oleh Presiden Nomor 100 Tahun 2024, di mana transformasi kelembagaan KPPU nantinya seluruh pegawainya adalah ASN. Dan yang kedua, definitif ada Sekjen sebagai Eselon 1 dan beberapa eselon, ada 6 Eselon 2.

Selanjutnya, kami sampaikan juga apresiasi dan terima kasih, bahwa pagu anggaran yang telah ditetapkan, disampaikan oleh Pimpinan tadi, sebesar 105.373.198.000. Walaupun penetapan ini karena batasan waktu yang memang sudah mesti oleh kami serahkan 2 September di Banggar, tapi kami mengapresiasi dukungan politik dari Komisi VI yang dituangkan pada saat RDP 10 Juni 2024 dan 2 September 2024 sebesar 416.766.081.000. Jadi, totalnya adalah 525.139.279.000. Walaupun hari ini saya dengan terpaksa mesti menandatangani yang di Rp105 miliar tadi. Mudah-mudahan ini akan dipertimbangkan di anggaran perubahan tambahan nanti, Pak.

Karena kami juga sebagai info sudah menghadap langsung kepada Wakil Menteri Keuangan pada tanggal 6 September kemarin, Bapak Thomas Djiwandono. Ada komitmen, bahwa perhatian kepada KPPU ini untuk diprioritaskan karena untuk kepentingan nasional, menjaga pertumbuhan ekonomi yang seperti disampaikan. Tetapi karena kondisi transisi, kami bisa memaklumi.

Saya kira itu saja, Pak, yang kami sampaikan. Demikian.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (M.SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Walaikumsalam,*

Terima kasih, Pak Ketua KPPU, Pak Ifan.

Selanjutnya kami persilakan Pak Rudi, Kepala BP Batam. Ini anggarannya paling lumayan ini, meskipun *gak nambah* juga.

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (MUHAMMAD RUDI):**

Terima kasih, Pimpinan.





*Bismillahirrahmanirrahim,*  
*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat sore buat kita semua,

**Yang kami hormati Pimpinan, dan  
Para Anggota Komisi VI DPR RI,  
Kepala Badan Standardisasi Nasional,  
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha,  
Kepala Badan Pengusahaan dan Kawasan Perdagangan Bebas dan  
Pelabuhan Bebas Sabang, dan  
Bapak/Ibu semua yang hadir pada sore hari ini,**

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Taala*, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dalam rangka Penyesuaian RKA BP Batam, Badan Standardisasi Nasional, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan BP Sabang Tahun Anggaran 2025 dengan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada yang terhormat Pimpinan, dan para Anggota Komisi VI DPR RI atas segala dukungannya dalam proses pembangunan yang kami laksanakan di KBPPB Batam, khususnya selama kami bertugas.

Dukungan ini, Bapak/Ibu sekalian, saya rasa menjadi penguat komitmen dan motivasi bagi BP Batam dalam mewujudkan Batam Rempang Galang menjadi kawasan ekonomi yang semakin modern dan mampu bersaing dengan kawasan serupa di Indonesia dan negara lainnya.

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan rencana kerja BP Batam Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029 sekaligus tahun pertama pelaksanaan RPJPN 2025-2045. Dalam tahun 2025, tema pembangunan KPBPB Batam adalah percepatan peningkatan investasi melalui pengembangan kawasan dan pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut sejalan dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2025, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sekaligus mendukung prioritas nasional 5, yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Sehubungan dengan itu, target investasi KBPPB Batam difokuskan dalam pengembangan industri dan sektor-sektor strategis yang memberikan nilai tambah tinggi, yaitu:

1. Hub Logistik Internasional;
2. Industri Kedirgantaraan;
3. Industri Ringan dan Bernilai Tinggi;
4. Industri Digital dan Kreatif;



5. Pusat Perdagangan dan Keuangan Internasional; serta
6. Pariwisata Kesehatan yang Terintegrasi.

Dalam tahun 2025, pagu belanja BP Batam tidak mengalami perubahan dari pagu anggarannya, yaitu sebesar Rp1.992.728.199.000,00. Jumlah dana tersebut bersumber dari PNBPN Badan Layanan Umum sebesar Rp1.978,09 miliar atau 99,27%, Pinjaman luar negeri sebesar Rp8,76 miliar atau 0,44% dan rupiah murni pendamping pinjaman luar negeri sebesar Rp5,87 miliar atau 0,29%.

Pagu belanja tersebut dialokasikan untuk dua program, yaitu:

1. Dukungan Program Manajemen, sebesar Rp906.514.280.000,00 atau 45,49%; dan
2. Program Pengembangan Kawasan Strategis, sebesar Rp1.086.213.919.000,00 atau 54,51%.

Dalam program yang pertama, yaitu dukungan manajemen, kegiatan utamanya adalah kegiatan operasional BP Batam, seperti:

1. Pengelolaan pegawai;
2. Pengelolaan organisasi;
3. Kegiatan pemeliharaan;
4. Pengadaan barang dan jasa; serta
5. Kehumasan.

Sementara itu untuk program yang kedua meliputi berbagai kegiatan yang lebih mendukung layanan untuk peningkatan investasi, seperti:

1. Pelayanan perijinan bagi investor;
2. Pelayanan logistik; serta
3. Program prioritas berupa pembangunan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur kawasan.

Program Pengembangan Kawasan Strategis terdiri dari pengembangan beberapa layanan seperti layanan kepelabuhanan, penyediaan air bersih, rumah sakit dan lain sebesar Rp480,90 miliar dan kegiatan pengembangan infrastruktur kawasan sebesar Rp605,31 miliar yang didanai dengan PNBPN.

Pendanaan PNBPN tersebut termasuk untuk kegiatan pengembangan infrastruktur kawasan untuk menarik investasi, serta mendukung proyek strategis nasional Rempang *Eco City*, yaitu pembangunan prasarana bidang perumahan dan pemukiman sebesar Rp88,60 miliar. Pembangunan sarana pengembangan kawasan sebesar Rp47,46 miliar, serta peningkatan prasarana konektivitas sebesar Rp469,25 miliar.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan mengenai penyesuaian RKA BP Batam Tahun Anggaran 2025 dengan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.

Atas perhatian, bantuan, dan dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang terhormat, kami ucapkan terima kasih.



Demikian, terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (M.SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Waalaikumsalam,*

Terima kasih, Pak Rudi, Kepala BP Batam.

Selanjutnya dari Pelabuhan, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Pak Ketua, silakan menyampaikan.

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (ISKANDAR ZULKARNAIN):**

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat Siang dan,  
Salam Sejahtera buat kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan Komisi VI DPR RI,  
Yang terhormat Bapak dan Ibu para Anggota Komisi VI DPR RI,  
Yang terhormat Kepala Badan Standar Nasional,  
Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha,  
Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam, serta  
Bapak/Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan,**

Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan Puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Taala*, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkenan-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR RI dan Pimpinan Kementerian/Lembaga untuk membahas tentang Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran, serta lain-lainnya.

Selanjutnya *shalawat* beriring salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan alam Nabi Besar Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam*. Salam sejahtera juga buat keluarga dan sahabat Beliau sekalian.

**Pimpinan, dan  
Anggota Komisi VI yang kami hormati,**

Sebelum kami menyampaikan paparan terkait dengan RKA Tahun Anggaran 2025 BPKS sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran, serta lain-lainnya, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan, dan Anggota Komisi VI atas segala dukungan dan perhatian terhadap semua proses anggaran dan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPKS. Semoga dengan dukungan dari Bapak/Ibu sekalian, pembangunan dan perekonomian di Sabang ke depan akan lebih baik dalam berkontribusi bagi kemajuan masyarakat Sabang, masyarakat Aceh secara keseluruhan maupun pembangunan nasional.

**Pimpinan, dan  
Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati,**

Sesuai dengan dokumen rancangan awal RKP Nasional Tahun 2025 sebagai tahapan awal untuk Indonesia Emas tahun 2045, maka fokus rencana kerja BPKS Tahun 2025, yaitu:

1. Sertifikasi dan digitalisasi aset/*database online* Aset BPKS, yaitu Tanah dan Bangunan dan Penataan Ruang Kawasan Pulau Aceh; kemudian
2. Penuntasan Pelabuhan Penyeberangan Balohan dalam upaya fungsionalisasi dan komersialisasi aset;
3. Pelaksanaan strategi bisnis melalui penyiapan dokumen IPRO, pelaksanaan promosi potensi *Trade, Tourism, and Investment* (TTI); kemudian
4. Peningkatan layanan Investasi/berusaha pada Unit PTSP; serta
5. Fungsionalisasi dan komersialisasi Aset eksisting.

Sesuai dengan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 19 Juli 2024, perihal : Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2025, serta rapat dengar pendapat yang sudah kita ikuti beberapa kali di Komisi VI ini, BPKS menerima Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 senilai Rp53.494.482.000,00, yang terdiri dari,

1. Untuk program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp15.813.191.000,00; kemudian
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp37.681.291.000,00.

Di mana sebelumnya juga kami telah usulkan pergeseran *rekomposisi* alokasi anggaran pada Pagu Indikatif BPKS senilai Rp2.618.082.000,00 dari program dukungan manajemen ke program pengembangan kawasan strategis.

**Pimpinan, dan  
Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati,**

Demikian yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami kepada Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI untuk dapat terus mendukung pengembangan dan pembangunan kawasan Sabang.

Atas perhatiannya dan dukungannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (M.SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Walaikumsalam,*

Terima kasih, Pak Kepala BPKS Sabang.

Saya usul, Pak Harris, Sabang ini jangan di undang sering-sering ke DPR. Nanti uangnya habis untuk tiket pesawat sama bahan fotokopi ini, 53 miliar *gimana*, habis untuk bahan presentasi ini, jangan-jangan.

Baik.

**Bapak-Bapak/Ibu-Ibu yang saya hormati,**

Nanti kita ingin mendengarkan dari Anggota, tanggapan singkat-singkat saja. Kesempatan pertama saya berikan pada sebelah kiri, Bu Evita.

**F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):**

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

**Bapak-Bapak mitra kerja yang hadir sore hari ini yang saya hormati,**

Untuk kesempatan ini saya mau *ngambil* kesempatan untuk *Minal Aidin Wal Faizin*, mohon maaf lahir dan batin. Kita *enggak* tahu, mungkin ini rapat kita yang terakhir di Komisi VI bersama mitra, walaupun tidak, mungkin kita-kita ini belum tentu juga ditempatkan di Komisi VI. Jadi, pada kesempatan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kita bermitra 5 tahun ini, ada kata-kata yang kurang berkenan ya, Pak, ya. Tahunya Bu Evita galak, *kan gitu* ya, Pak, ya. Tapi *enggak*, semuanya maksudnya baik, Pak. Bagaimana, ya *kan*, kemitraan ini benar-benar bisa memiliki makna ya, Pak, ya, bisa memperbaiki kinerja daripada Bapak-Bapak. Dimaafkan *kan*, Pak, ya kalau ada kesalahan, ya? Kalau kesalahan, ini Bapak, sudah saya maafkan.

Ada beberapa catatan. Izin, Bapak Pimpinan, untuk beberapa hal. Yang pertama, untuk Badan Standardisasi Nasional (BSN). Kita tahu, Pak, bagaimana BSN ke depan ini, saya harapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran konsumen di dalam negeri terhadap produk ber-SNI, Pak. Karena kita tahu sangat kecil sekali saat ini ya *kan*, kesadaran konsumen itu untuk

memiliki yang namanya sertifikat ber-SNI ini dan mereka juga mempunyai kepedulian, Pak, untuk jaminan mutu ini, meningkatkan jaminan mutu.

Karena kalau tidak, bagaimana kita mampu untuk meningkatkan produk-produk dalam negeri ini untuk bisa ekspor, Pak, kalau mereka tidak memiliki standardisasi nasional yang baik.

Kemudian juga tidak hanya itu saja, Pak, UMKM kita ini apalagi, Pak, yang perlu digerakkan, Pak. Untuk mereka itu sadar akan memiliki SNI dan bagaimana produk-produk mereka ini ber-SNI yang berkualitas, Pak ini, Pak Kepala ya, Kepala BSN.

Untuk KPPU. KPPU ini, saya ingin bagaimana kelembagaan ini, Pak, status dari kelembagaan ini jelas. Saya senang tadi Bapak mengatakan bahwa sudah ada ketetapan bahwa nanti ke depan, apa namanya, KPPU ini akan diisi oleh ASN. Tetapi jangan ASN buangan, Pak, ya *kan, gak* mau juga kita ditempati oleh ASN tetapi ASN yang buangan. Harus *the right man on the right place, gitu*, Pak. Jadi, tidak hanya ada ASN yang akan mendekati masa pensiun, *cemplungin* di KPPU, karena tugas KPPU ini *gak* mudah, *gitu*, Pak. Tugas KPPU ini berat, apakah itu di aspek hukumnya, apakah itu di aspek, apa namanya, sosialnya, Pak.

Jadi, persaingan usaha ini kan ke depan akan banyak, apalagi dengan *online e-commerce* ini, Pak. Ini akan banyak sekali tantangan-tantangan kita ke depan. Nah, kalau Bapak tidak memiliki staf atau tim yang mumpuni, ya sama *aja* dengan sekarang, Pak, yang Bapak, karena kalah-kalah terus ketika Bapak menggugat ke pengadilan, *kan* begitu yang terjadi saat ini. Di antara senang mendengar info yang Bapak berikan, ada kekhawatiran. Jangan sampai KPPU ini menjadi tempat buangan daripada ASN-ASN yang tidak terpakai di tempat lain, Pak. Jadi, Bapak juga *ngajukan* syarat, harus ada yang namanya kompetensi, tes kompetensi ini nanti ke depan.

Kemudian, untuk BP Batam. Penyerapan Bapak ini masih kecil ya, Pak, ya? Sebenarnya BP Batam, Kepala BPKS sudahlah kecil anggarannya, BPKS ini penyerapannya kecil pula, *gitu*, ya *kan*. Nah, untuk BP Batam ini, memang tantangannya berat ya, Pak, ya, karena persaingan Bapak ini di regional ya, Pak, ya. Saingan dengan Malaysia, kita tahu orang sekarang ini pada berinvestasi di Malaysia *kan*, Pak Kepala BP Batam, ya?

Jadi, bagaimana Bapak ke depan mencari solusi untuk mengatasi rendahnya minat investasi, ya *kan*, di Indonesia khususnya di BP Batam. Dan tentunya akan terus konsisten untuk membangun dan melakukan pembangunan yang tidak hanya pro kepada investasi, tetapi juga pro kepada kesejahteraan rakyat ya, Pak, ya.

Saya juga ingin melihat nanti proyek Rempang Eco-City ini, Pak, bisa menjadi kenyataan. Saya tahu banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BP Batam. Namun kita melihat, *Insyallah*, kalau saya di depan tetap di Komisi VI, ya *kan*, proyek Rempang Eco-City ini bisa berjalan dengan baik.

Untuk BPKS. Tentunya ya tadi Pak ini bilang, jangan sering-sering di undang ya, Pak Ketua, ya, ke Jakarta, anggarannya memang kecil. Tapi saya dari rapat tadi pagi, Pak, dan kemarin ini cukup miris, bahwa semua mitra itu anggarannya turun, ya *kan*. Sementara tantangan kita ke depan itu semakin berat.

Nah, sekarang pintar-pintar Bapak *aja deh*, KPPU, *gimana* pendapatan negara, pendapatannya, nonpajaknya BNPB, apa, BNPB-nya, eh bukan pajak, iya, BNPB-nya ditingkatkan. Kepala BP Batam BNPB-nya ditingkatkan, ya itulah yang bisa, apa namanya, menambah dari anggaran Bapak-Bapak.

Kemudian, kalau BPKS ini, memang banyak sekali hambatan-hambatan ya, Pak, ya, aksesibilitas dan lain-lain. Wah, kalau mau membangun Sabang ini, itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh BPKS. Ini benar-benar harus menjadi kerja nasional. Ya *kan*, saya sudah dengar *nih*, kunker ke Batam segala, presentasi mengenai Batam, sudah saya dengar ya, Pak, ya. Ya, kalau sendiri, *gak* mungkin *kebangun*. Bagaimana Bapak mendekatkan diri kepada BUMN. Ya, kan BUMN ini *kan* sebenarnya *agent of development* ya, sebagai perintis, bisa bangun hotel di BP Batam, ya *kan*. Kemudian, ASDP bagaimana bisa bantu untuk penyeberangan. Ini benar-benar diperlukan kerja sama yang benar-benar maksimal ya *kan*, untuk kalau memang kita mau membuka, apa yang namanya, Sabang ini menjadi kawasan *resort* ke depannya dengan, dengan baik.

Saya rasa demikian, Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (M.SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Terima kasih, Bu Evita. Ada pantasnya Bu Evita tadi minta maaf *duluan*, karena di saat anggaran yang sedikit saja, harapannya masih besar, itu patut minta maaf, itu.

Silakan, Pak Harris.

**F-PDIP (DR. IR. HARRIS TURINO, S.H., M.SI., M.M.):**

Baik.

Terima kasih, Pimpinan

**Yang terhormat Pimpinan, dan  
Rekan-rekan Anggota Komisi VI,  
Yang terhormat 3 kepala dan satu Ketua,  
Pak Kepala BSN, Pak Kukuh Achmad ya,**

Ini untuk BSN, untuk keseluruhan dulu. Kita tahu bahwa memang harus disadari anggarannya turun semua, Pak, tetapi yang mengalami bukan





*cuman* lembaga, tetapi juga semua kementerian yang ada dan menjadi mitra kami di Komisi VI juga mengalami masalah yang sama, ya. Jadi, tolong dimengerti karena ini masa transisi, saya yakin akan diperjuangkan oleh Pak Sekjen, ya. Ini Sekjen partai terbesar nomor 2, Pak, ya *kan*. Jadi, *enggak* sembarangan, akan diperjuangkan oleh Pak sekjen melalui anggaran perubahan setelah terjadinya pergantian kepemimpinan.

Peluangnya masih ada dan kami pada prinsipnya di Komisi VI mendukung, Pak, karena usulan yang Bapak kemukakan, ini memang masuk akal dan memang dibutuhkan untuk tentu saja semata-mata melindungi kepentingan nasional, ya. Ini juga rapat yang terakhir, kalau Bapak, Bapak pasti masih di lembaganya masing-masing. Kami, terpilih kembali tapi belum tentu di Komisi VI, ya. Semoga saja tetap bertahan di sini, supaya bisa tetap kita berinteraksi ke depannya. Jadi, mohon maaf kalau banyak kesalahan di antara kita.

Saya akan satu per satu, Pak, BSN, Pak. Ini di industri IHT, Pak. Industri Hasil Tembakau, ini sedang ramai sekali. Mengangkat 2 hal, yang pertama adalah isu mengenai kenaikan cukai. Kalau kita lihat dari RAPBN, itu ada rencana kenaikan cukai sebesar 5,9% menjadi sekitar Rp243 triliun, ya, dan naik ini adalah kenaikan yang terus-menerus, Pak. Tahun ini naik 10%, tahun lalu naik 10%, tahun sebelumnya naik 24% dan 34%. Tahun depan akan dinaikkan lagi menjadi 5,9%, ini *concern* utama.

Dan *concern* yang kedua adalah munculnya PP Nomor 28 tentang Pengendalian IHT. Ini yang urusannya dengan Bapak, ya. Mengenai Pasal 431 ayat 1 huruf B tentang batas maksimal kadar Nikotin dan Tar yang ada di dalam kandungan rokok, Pak. Kita semua tahu bahwa tembakau Indonesia memang tembakau yang kadar Nikotinnya dan kadar Tarnya tinggi, Pak. Kalau kita lihat pengalaman apa yang terjadi tahun 2012, ketika keluarnya PP Nomor 109 Tahun 2012, membatasi Nikotin dan Tar, yang terjadi adalah peningkatan Impor yang luar biasa terhadap tembakau, Pak.

Jadi, kepentingan asing sangat besar sekali di sini, yang kemudian melalui skema *Framework Convention Tobacco Control* (FCTC), ya. Dan FCTC ini tidak diratifikasi oleh Indonesia, Pak. Sehingga dari industri tembakau ini *kan* akan menggunakan SNI, Pak ya. Patokannya berarti akan ada di Bapak.

Maka dari itu Pak, jaga kepentingan nasional Pak, ya. Supaya memang Industri Hasil Tembakau yang menjadi industri *heritage* asli Indonesia dari hulu ke hilir, Indonesia tetap menjadi tuannya di negaranya sendiri. Ini penting, perlu peranan dari kepala BSN, walaupun anggarannya tidak disetujui. Kira-kira itu, Pak.

Untuk Pak Fanshurullah. Memang kenaikannya 500%, rasanya doanya harus lebih banyak, Pak, ya *kan*? Doanya harus lebih banyak. Harapannya kami sepakat, Pak, KPPU itu harus anggarannya memadai, karena kalau *enggak*, Bapak akan berhadapan dengan persaingan usaha. Kalau persaingan usaha kecil-kecil, masih oke *lah*, masih takut sama Bapak. Tapi



kalau pemain-pemain raksasa, yang Bapak kemudian katakan kunjungan ke banyak negara, kalau sudah ada anggarannya ya macan ompong, Pak. Maka harapannya, melalui nanti RAPBN perubahan, ini bisa disetujui.

Saya titip saja Starlink, Pak, ya, bukan Starbuck keliling, tetapi Starlink. Ya, ini tolong, Pak, kepentingan nasional, sekali lagi, harus dijaga, Pak. Kita tidak anti teknologi, kita tidak anti asing, tetapi kita mendukung sepenuhnya untuk kepentingan nasional.

Untuk Pak Gubernur, eh, Pak Muhammad Rudi. Ya, minggu lalu mungkin Bapak tidak hadir karena menghadiri pemakaman Almarhum, ya. Ada satu pertanyaan yang belum dijawab oleh Pak Wakilnya, Pak. Mengenai Karimun-Batam-Bintan, Pak, ya. *Kan* berarti bukan cuman Batam, Pak, berarti apakah nanti Ketua BP-nya, ini nanti tidak lagi di tangan *ex officio* Walikota Batam tetapi *ex officio* Gubernur Kepulauan Riau, kelihatannya? Orangnya *sih* sama, tetapi nomenklturnya bergeser kelihatannya, Pak, ya. Selamat, Pak. Semoga sama-sama menang, Pak, karena kelihatannya kita di situ berjuang bersama, Pak, ya.

Dan untuk BPKS, ya. Sepakat, Pak, jangan *keseringan* ke sini, kita saja yang ke sana, Pak, ya. Kita melihat Aceh, karena ini adalah juga wujud kehadiran negara ya, terhadap satu provinsi yang sebenarnya kaya sekali, Pak.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (M.SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Terima kasih, Pak Harris.

Pesan saya, kalau nanti ke sana ke Sabang, bawa bekal makanan sendiri-sendiri. Biar tamunya *enggak*, biar tuan rumahnya *enggak* mengeluarkan anggaran untuk ini, Pak. Karena *saking* kecilnya anggaran itu.

Bu Nevi. Silakan, Bu Nevi.

**F-PKS (HJ. NEVI ZUAIRINA):**

Terima kasih.

**Pimpinan, dan  
Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati,  
Ketua KPPU,  
Kepala BSN,  
Kepala BPKS, dan  
Kepala BP Batam,**



Kerja sama kita selama 5 tahun ini luar biasa, melewati masa pandemi Covid-19 yang menggerus perekonomian Indonesia yang juga luar biasa. Dan tentu apa yang kami sampaikan di parlemen ini untuk kebaikan bangsa Indonesia. Untuk itu mungkin dari kami, khususnya saya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan.

Tetap, Pak, pertemuan terakhir kami juga tetap mengkritisi apa-apa yang Bapak kerjakan ke depan. Kemudian, nanti melewati transisi kepemimpinan nasional, Pak, tolong pastikan Bapak Pimpinan melakukan sinkronisasi program dengan visi kepemimpinan Presiden yang baru, ya. Dan terus juga, Bapak juga melakukan apa, bentuk evaluasi masing-masing mitra terhadap program serta dampaknya kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir ini. Bapak juga harus menyampaikan kepada Pimpinan yang baru, ya. Terus juga realisasi anggaran di tahun 2024 ini, juga Bapak-Bapak pastikan, bahwa apakah realisasi ini akan selesai semuanya, 100%.

Kalau saya lihat laporannya, BSN baru 69%, KPPU 75%, BP Batam 39%, BPKS 35%. Dan kita memastikan bahwa Bapak semua dapat benar-benar maksimal dan menjalankan program-program tahun 2024 yang sudah direncanakan. Dan juga untuk program prioritas yang diajukan dalam RKA KL 2025, tentu pasti *kan*, Pak, untuk, apa dapat dirasakan oleh masyarakat, ya, secara langsung, ya, dan tentu ada penyesuaian-penylesaiannya.

Terus juga, Pak, tolong juga dipastikan meminimalkan potensi pemborosan anggaran di tahun 2025. Kami berharap, anggaran yang dialokasikan dapat penambahan secara tepat, terserap maksimal dan bisa bermanfaat bagi rakyat.

Selanjutnya juga kami menginginkan adanya nanti ke depan, Pak, indikator kinerja spesifik yang akan diprioritaskan, ya, untuk dinilai dalam pelaksanaan anggaran 2025, ya. Jadi, kita *kan* dalam menyusun anggaran akan mempengaruhi capaian *outcome* ya, dan *output* yang diharapkan ya, oleh BSN, KPPU, BP Batam, dan BPKS pada tahun 2025 nanti.

Lalu selanjutnya, untuk wilayah Batam dan Sabang, dengan anggaran yang ada, apakah ada strategi khusus ya, yang untuk memastikan bahwa pemberian manfaat yang maksimal kepada masyarakat? Ya, jadi kita tahu bahwa APBN ini anggaran yang bersumber dari APBN, mungkin kalau BP Batam dari anggaran inikan, yang diusahakan sendiri, benar-benar digunakan untuk memberikan manfaat, ya, seluas-luasnya bagi masyarakat.

Terus selanjutnya, yaitu kita ke depan, mekanisme pengawasan itu juga harus ya, menjadi target kita dalam kinerja kita, ya, adanya prinsip “*good corporate governance*” atau tata kelola yang baik ya dalam pemerintahan. Jangan sampai masyarakat tidak percaya kepada kita. Ya, kita tingkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, serta memberikan kontribusi terciptanya kesetaraan masyarakat, pegawai, dan *stakeholder* lainnya. Itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.



**KETUA RAPAT (M.SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Terima kasih, Bu Nevi.

Pak Amin, silakan.

**F-PKS (AMIN AK, M.M.):**

Terima kasih.

**Pimpinan, dan  
Anggota Komisi VI yang saya hormati,  
Bapak-Bapak Ketua KPPU,  
Kepala BSN,  
Kepala BPKS,  
Kepala BP Batam, dan  
semua jajaran yang hadir,  
Hadirin sekalian yang dirahmati Allah,**

Karena ini, *Insyah Allah*, pertemuan terakhir, Pak, ya, Raker terakhir di Komisi VI. Apa Bapak *nih* dengan Komisi VI, dan suasananya, suasana yang agak kurang menggembirakan, karena memang anggaran-anggarnya yang masih belum sesuai harapan, ya. Apalagi melihat KPPU *nih* ya, anggaran Rp105 miliar. Terus usulannya, Pak, yang menggembirakan ya, 525. Jadi usulannya meningkat 5 kali lipat, *gitu* ya. *Enggak* apa-apa Pak, bagus ya. Ya, karena ini kita belum tahu, Pak, ya dan ini, seolah ini raker yang terakhir di antara kita *nih*, ya. Saya menyampaikan 3 tema *aja*, Pak. Tema pertama, harapan, yang kedua doa, yang ketiga, permohonan maaf, Pak, itu tadi yang saya sampaikan.

Jadi, harapan sama doa, *gitu* ya. Untuk para mitra kami yang hadir, terkait dengan keterbatasan anggaran termasuk KPPU *nih*, Pak, ya. Semoga dikabulkan, Pak, tapi dengan anggaran yang ada sekarang ya, bagaimana tetap bisa bekerja keras dan mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mencapai target-target? Kalau saya boleh tadi menyitir pernyataan Pak Erick di raker sebelum ini, ya, kecilnya anggaran ini dianggap sebagai sebentar ujian *lah*, Pak, ya. Kalau orang diuji *kan* mestinya imannya tambah kuat, *gitu* Pak, ya. Kalau lolos ujian nanti ya, *Insyah Allah*, Pak, rezekinya lebih banyak lagi di masa yang akan datang, dengan pemerintahan yang baru, ada harapan baru dan itu saya yakin ya sangat optimis, begitu. Itu untuk KPPU.

Kemudian, untuk BSN, Pak. Kalau BSN *nih* saya punya usulan, ya *Alhamdulillah*, kami terpilih lagi, Pak, tapi juga belum tentu nanti tetap di Komisi VI dan juga apakah Bapak jadi mitra Komisi VI berubah apa *enggak*, kita juga *enggak ngerti*. Itu sudah ada urusan orang-orang atas, Pak, urusannya *wong* pusat *jarene*.

Ya, kita punya usulan, bagaimana BSN ini bisa, apa namanya, berkolaborasi, Pak, dengan asosiasi industri dan perdagangan, membentuk

sebuah asosiasi bagi industri untuk penerapan SNI yang ini dikoordinasi oleh BSN. Ini sebagai wujud ya, hadirnya negara dalam melindungi industri nasional. Tujuannya antara lain adanya asosiasi ini, Pak, ya untuk mendukung kewajiban penerapan SNI. Kemudian, tentu, peran-peran advokasi yang bisa dimaksimalkan, pendampingan dan juga nantinya membantu perumusan, apa namanya, komponen kewajiban pemenuhan TKDN itu.

Saya juga mohon maaf, kalau hal ini mungkin sudah dirintis atau malah sudah ada, saya enggak *ngerti nih*. Ini barangkali ya usulan *aja* untuk, apa namanya, mengefektifkan komunikasi dan juga memantau pelaku-pelaku usaha yang sudah memenuhi SNI dan juga yang belum, lalu memudahkan komunikasinya. Ini demi lebih optimal atau mengoptimalkan peran BSN dalam membendung serbuan produk-produk impor dan untuk menjaga kualitas produksi industri kita, dalam negeri ini. Karena di antara produk-produk impor, saya kira juga banyak yang mungkin belum memenuhi standar SNI kita, walaupun mungkin sudah ada yang di atasnya atau mungkin di bawahnya. Tapi bisa jadi, ada juga yang masih belum memenuhi standar, standar SNI. Itu Untuk BSN.

Untuk BPKS sama BP Batam. Harapan kami tentu sama *lah* dengan teman-teman yang lainnya. Harapan baru di pemerintahan yang baru, nanti dengan anggaran baru dengan target-target baru, Pak, ya. Apalagi BPKS, ini setiap hadir ke rapat ke Komisi VI, suasana ini suasana keprihatinan terus, Pak, ya. Tentu nanti yang akan datang, tidak lagi suasananya suasana keprihatinan, tapi suasana berganti suasana lebih menggembirakan.

Saya yakin, Pak, banyak sekali, apa namanya, apa, peluang-peluang bisnis atau proyek-proyek yang bisa dikerjakan dan itu sangat besar dan strategis, saya yakin. Seandainya ada perumusan bersama, ya, dengan dukungan anggaran ya, ada *political will* dari pemerintah pusat juga, saya yakin ini Aceh itu bisa menjadi provinsi yang jauh lebih maju daripada sekarang, saya kira, ya. Saya kira itu, Pimpinan.

Untuk mengakhiri dari apa yang saya sampaikan, karena temanya permohonan maaf, saya menyampaikan pantun.

*Kalau ada jarum yang patah  
Jangan disimpan dalam laci  
Kalau ada kata yang salah  
Jangan dilaporkan polisi*

*Mendayung sampan ke tepian bersama kekasih  
Cukup sekian terima kasih*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (M.SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Makasih, Pak Amin.*



Masih ada? Silakan.

**F-GERINDRA (IR. H. LA TINRO LATUNRUNG):**

Terima kasih.

**Bapak Pimpinan, dan  
Teman-teman Anggota Komisi VI yang saya hormati,  
Ketua KPPU,  
Kepala BSN,  
BPKS, dan  
BP Batam yang saya hormati,**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Saya ringkas saja, Pak. Mulai dari BSN, tadi sudah ada PNBPN 40 miliar lebih. Itu kalau bisa dibuatkan sedikit informasi, PNBPN yang didapatkan dari mana.

Kemudian, ini standar-standar SNI yang ada sekarang ini, apa pun yang diproduksi, saya lihat banyak yang tidak berstandar SNI. Bagaimana mengatasi semua itu, Pak, yang dalam perdagangan sering merugikan masyarakat kita. Contoh saja, misalnya satu contoh, masalah besi beton. Itu ada yang sampai dikatakan KW 1, jadi jualnya memang sudah begitu. Apakah memang ini *enggak* ada kewajiban untuk semua harus SNI? Besi beton itu ada dikatakan KW 1, ada SNI, ada KW 2 dan lain-lain, dan lain-lain. Ini *kan* jelas tidak berstandar nasional Indonesia yang kita harapkan, tidak standar SNI dan ini bagaimana mengatasi hal itu? Sehingga material- material yang ada yang digunakan oleh masyarakat bisa betul-betul sesuai dengan standar yang diharapkan. Banyak kejadian-kejadian, misalnya dalam perdagangan kita. Saya kasih contoh tadi, besi dikatakan SNI, tetapi sebenarnya setelah dalam pengukuran, ya tidak sesuai standar itu. Nah, bagaimana mengatasi yang hal-hal yang demikian?

Tadi juga dikatakan Ketua KPPU, kita bersyukur bahwa, *Insyallah*, mungkin nanti semua di sana jadi ASN. Pertanyaannya adalah, *kan* selama ini menggunakan tenaga-tenaga, mungkin kontrak ya. Kontrak, dan jumlahnya mungkin sudah puluhan juga, mungkin sampai 100. Tenaga-tenaga kontrak yang sekarang ini, apakah itu yang langsung diangkat menjadi ASN atau ini dibubarkan, ada ASN yang masuk? Seperti yang disampaikan tadi, jangan sampai ASN yang datang itu juga tidak bisa maksimal dibanding orang-orang yang ada sekarang. Apakah yang sudah berjasa selama ini yang bersama dengan Bapak, itu yang langsung diangkat menjadi ASN?

Kemudian BPKS. Ini memang, maaf kalau saya pribadi, sangat prihatin. Kalau dikatakan BPKS itu hidup juga segan, mati juga tidak, ya. Tadi saya senang, tadi banyak teman-teman mengatakan, mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan, kami semua masih di Komisi VI. Memang sepantasnya kita berkunjung ke sana, untuk melihat bagaimana *sih blueprint*

sebenarnya BPKS ini untuk memajukan BPKS yang selama ini begitu-begitu terus, ya. Dapat anggaran ratusan, 200, ya sampai ke situ saja, tidak ada perkembangan-perkembangan yang bisa memberikan kontribusi untuk daerahnya, dan apalagi secara nasional.

Harapan saya mudah-mudahan nanti bisa terjadi, teman-teman masih di sini dan juga masih bermitra dengan BPKS, baiknya kita ke sana, melihat kondisi yang sebenarnya. Mungkin ada satu hal saja yang bisa kita munculkan, sehingga BPKS ini bisa betul-betul bisa menjadi perhitungan secara nasional. Dan tentu kalau sudah ada *blueprint*, ada rencana-rencana itu, tentu juga saya pikir Komisi VI tidak, tidak keberatan untuk memberikan anggaran yang besar, kalau memang ada rencana-rencana ke depan.

Untuk Batam. Ya, tidak ada saya lihat, anggaran normal-normal saja. *Cuman* saya perlu menyampaikan ada aspirasi-aspirasi masyarakat. Ada katanya lahan ya, ini cuma aspirasi yang disampaikan, ada lahan hutan lindung kurang lebih 1000 hektar yang sudah jadikan, akan dijadikan HPL. Nah, ini saya cuma mendengarkan, ada yang menyampaikan kepada kami. Tolong ditanyakan, bagaimana studinya? Apakah itu sudah selesai, dari hutang lindung di bawa ke HPL?

Terima kasih, Pimpinan.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT (M.SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

*Walaikumsalam,*

Terima kasih, Pak La Tinro.

Ini saya usul *aja*. Jadi, pertanyaannya, saya usul, pertanyaan tidak perlu ditanggapi balik, biar lebih singkat. Nanti yang diperlukan, tertulis, karena sebagian besarnya tadi sebenarnya harapan-harapan, ada pertanyaan sedikit nanti, Pak La Tinro, kalau diperkenankan, tertulis saja boleh jawabannya? Ya, baik.

Kalau tidak perlu ditanggapi balik, saya akan bacakan kesimpulan kita pada rapat kali ini, karena kesimpulannya juga sudah jelas. Tolong ditayangkan kesimpulannya.

Baik, saya bacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari ini,

1. Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun

Anggaran 2025 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI nomor B sekian-sekian, tanggal 10 September 2024, perihal Penyampaian Hasil Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

- a. Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebesar Rp223.867.121.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*)
- b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp105.373.198.000,00 (*Seratus Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*)
- c. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebesar Rp1.992.728.199.000,00 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*)
- d. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sebesar Rp. 53.494.482.000,00 (*Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Sesuai surat Badan Anggaran DPR RI tersebut, Komisi VI DPR RI meminta kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang untuk segera menyampaikan penyesuaian rincian anggaran per program paling lambat tanggal 12 September 2024, dan untuk selanjutnya disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI sebagai penetapan.

Setuju ya?

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL (KUKUH S. ACHMAD):**

Sedikit koreksi editorial, Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT (M.SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Oke.

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL (KUKUH S. ACHMAD):**

Badan Standardisasi itu pakai D, Pak. "Badan Standardisasi". Jadi, semua pakai huruf D.





**KETUA RAPAT (M.SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Ya, pakai huruf D. Ya, koreksi huruf.

Setuju, ya? ini ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Standardisasi, standardisasi. Sudah betul, Pak? Baik.

2. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Ada yang tidak tertulis, Pak. "Seluruh Anggota Komisi VI DPR RI berdoa supaya pemerintahan baru nanti menambah anggarannya".

Baik, Bapak-bapak/Ibu-ibu, kalau *enggak* ada *closing statement*, kita akhiri, bisa kita akhiri?

**KETUA KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA (DR. IR. M. FANSHURULLAH ASA, S.T., M.T., IPU.):**

Izin, Pak.

**KETUA RAPAT (M.SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Silakan.

**KETUA KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA (DR. IR. M. FANSHURULLAH ASA, S.T., M.T., IPU.):**

KPPU, Pak. Tadi Bapak implisit Bapak sampaikan, harapan doa tadi, Pak.

**KETUA RAPAT (M.SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Iya.

**KETUA KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA (DR. IR. M. FANSHURULLAH ASA, S.T., M.T., IPU.):**

Apakah memungkinkan, ini pertanyaan kami, karena pernah di notulen sebelumnya, tanggal 10 Juni dan 2 September, bahwa dukungan dari Komisi





VI terhadap tambahan anggaran KPPU. Apakah memungkinkan *gitu*, Pak? Kalau dimasukkan di dalam notulen menjadi pertimbangan di APBNP atau ABT nanti, Pak.

**KETUA RAPAT (M.SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Dibahas dari awal lagi nanti.

**KETUA KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA (DR. IR. M. FANSHURULLAH ASA, S.T., M.T., IPU.):**

Oke.

**KETUA RAPAT (M.SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):**

Khusus untuk *budgeting*, *enggak* ada mengenal *carry over*, masalahnya.

**Baik, Bapak-Bapak/Ibu-Ibu,**

Dengan demikian berakhir sudah rapat dengar pendapat kita kali ini. Terima kasih sebesar besarnya kepada seluruh mitra. Mohon maaf, saya secara pribadi maupun mewakili Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI, kalau dalam interaksi kita selama ini ada salah, baik secara sengaja maupun tidak kita sengaja. *Insyah Allah* semuanya bertujuan baik demi manfaat sebesar besarnya bagi bangsa dan negara.

Terima kasih.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah rabbil alamin*, Rapat ini ditutup

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.31 WIB)**

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

**DEWI RESMINI, S.E., M.Si.**  
NIP. 197104071992032001

